

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika perkembangan dalam pengetahuan dan teknologi menjadikan tantangan dan peluang dalam bidang pendidikan khususnya jenjang pendidikan tinggi. Perubahan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa pada perubahan disruptif. Perubahan disruptif memberi kemudahan aksesibilitas informasi melalui internet, hal ini berdampak pula pada perubahan paradigma pola berpikir, pola sikap, dan pola bertindak warga negara yang menjadi cepat, dan mudah. (Machfiroh, 2019). Oleh karenanya, berbagai penyesuaian harus dipersiapkan dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi pada era digital seperti sekarang khususnya pada institusi perguruan tinggi. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh insan akademik pada pendidikan tinggi dalam menghadapi era digital adalah keterampilan berpikir kritis, keterampilan ini menjadi sangat penting terlebih banyaknya tantangan yang perlu dihadapi pada generasi yang akan datang. Churchill (dalam Bachman, 2005, hlm. 1) mengatakan, "kekuatan di masa datang adalah kekuatan pikir". Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang menjelaskan bahwa dalam menghadapi era digital Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. (Permendikbud No. 22 Tahun 2020, hlm. 47). Dalam mewujudkan hal tersebut perlu adanya persiapan yang mapan terhadap calon guru yang akan menghadapi profesi sebagai pendidik yang membantu tercapainya visi

menciptakan Pelajar Pancasila terutama dalam hal pengembangan keterampilan berpikir kritis.

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik maka peran utama yang mempengaruhi hal itu adalah guru. Sebagaimana diungkapkan bahwa Guru di abad ke-21 bukanlah guru yang hanya mahir dalam setiap topik dalam kurikulum, namun juga harus menjadi ahli dalam mencari tahu bersama dengan siswa tentang bagaimana melakukan sesuatu, cara untuk mengetahui sesuatu atau bagaimana menggunakan sesuatu dan melakukan sesuatu yang baru. Peran penting seorang guru pada abad ke-21 sebagai *role model* untuk kepercayaan, keterbukaan, ketekunan dan komitmen bagi siswanya dalam menghadapi ketidakpastian di abad ke-21 (Zubaidah, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan adanya penguatan keterampilan berpikir kritis pada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan keguruan sebagai upaya mempersiapkan calon guru yang berkualitas terutama dalam keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian pada mahasiswa calon guru pada Program Studi PPKn FKIP Universitas Pasundan. Calon guru PPKn idealnya mempersiapkan diri untuk menjadi pemikir kritis agar kemudian dapat mengimplementasikan saat menjadi guru PPKn yang akan menjadi panutan bagi peserta didik disekolah khususnya dalam era digital. Sebagaimana pendapat mengemukakan bahwa “...*In this digital age, teachers are confronting with new challenges every day in respect of students, their individual needs, new hardwares and softwares and own developmental needs*”.(Sharma, 2017, hlm. 2). Pendapat tersebut mengemukakan pada era digital seorang guru harus menghadapi tantangan baru untuk memahami peserta didik dengan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhannya.

Namun pada kenyataannya, hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui tahap observasi awal diperoleh data bahwa mahasiswa calon guru PPKn pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Pasundan belum sepenuhnya menguasai dan mampu mengaplikasikan keterampilan berpikir kritis pada proses pembelajaran dan aktifitas sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya proses pembelajaran yang masih terpusat pada dosen

sebagai pengajar, kurangnya partisipasi mahasiswa secara menyeluruh dalam konteks mengungkapkan argumen, dan kemampuan menganalisis dan menyimpulkan masih dalam tahap pengembangan.

Selain itu pada tahap evaluasi hasil pembelajaran pada ujian tengah dan akhir semester yang menggunakan soal dalam bentuk esai, masih terdapat mahasiswa yang belum mampu memberikan analisis terhadap jawaban dari permintaan soal dan juga masih belum berkembang. Kaitannya dengan menarik kesimpulan beberapa perkuliahan yang menggunakan metode presentasi masih terdapat beberapa mahasiswa yang belum memiliki keterampilan menyimpulkan terhadap materi yang mereka sajikan didalam perkuliahan. Hal lain ditemukan pada hasil kuesioner pengguna lulusan yang dilakukan oleh program studi PPKn FKIP Universitas Pasundan sumber data diperoleh pada dokumen borang akreditasi Program Studi PPKn tahun 2019, yang menyatakan bahwa diatas 70% pengguna lulusan menyatakan menginginkan penguatan mutu lulusan dalam bidang kreatifitas dan kemampuan berpikir kritis serta berkomunikasi. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari tim pengembang *e-learning* FKIP Universtas Pasundan bahwa masih terdapat mahasiswa yang kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran daring, yang terlihat dari kurangnya aktifitas mahasiswa dalam mengakses berbagai fitur yang disediakan dosen untuk menyajikan materi perkuliahan serta penyusunan *asignment* yang masih cenderung hanya untuk menggugurkan kewajiban saja tanpa memperhatikan kualitas. Selain itu perlunya kesadaran yang tinggi pada diri mahasiswa calon guru bahwasanya keterampilan berpikir kritis dalam era digital bukan lagi menjadi sebuah opsi melainkan sebuah tuntutan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas warga negara yang cerdas dan baik yang merupakan tujuan utama dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Beberapa hal diatas harus menjadi perhatian baik oleh mahasiswa maupun oleh lembaga, mengingat seiring berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin kuat, maka Pendidikan Kewarganegaraan harus menjadi mata pelajaran yang mendorong penguatan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Berpikir kritis sebagai unsur karakter bangsa yang cerdas harus dikembangkan di dunia persekolahan sampai perguruan tinggi. Hal ini disampaikan oleh Wahab (2008, hlm. 48) yang mengatakan

bahwa “guru terkadang hanya menggunakan cara berpikir konvergen sedang berpikir divergen sangat kurang, padahal berpikir seperti ini sangat penting bagi siswa”. Di pihak lain, Sapriya (2017) “mengungkapkan bahwa belum banyak muncul kesadaran yang tinggi di kalangan pendidik di persekolahan untuk mengajar para siswa tentang kondisi dunia yang semakin berkembang pesat yang menuntut adanya respon dengan pemikiran kritis”. Hal tersebut juga didukung dengan beberapa analisis peneliti mengenai permasalahan yang dialami guru dalam proses pendidikan seperti dikemukakan Hesti Sulastri (2019) yang dimuat pada laman *Republika* edisi Kamis 18 April 2019, bahwa “Di tahun 2017 dari 3,9 juta guru yang ada saat ini sebanyak 25% masih belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi”. Selain itu masih terdapat guru yang belum memahami kemampuan yang diperlukan dalam menunjang peradaban yang memasuki abad 21. “Akibatnya proses pembelajaran menjadi hal yang kurang menyenangkan sehingga keterlibatan peserta didik menjadi kurang maksimal. Masih banyak potensi peserta didik yang belum berkembang karena pembelajaran terkesan monoton dan konvensional”. (Sulastri, 2019, hlm. 2). Senada dengan hal tersebut dimuat laman berita *Republika* sabtu 12 januari 2019 Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menyatakan, “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan pelatihan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) bagi para guru. Pelatihan keterampilan HOTS tidak hanya bertujuan agar para guru terbiasa berpikir kreatif, kritis, inovatif, analitis dan mampu memecahkan masalah. Jika gurunya sudah mampu berpikir dan bertindak HOTS, maka para peserta didiknya akan juga terbiasa berpikir HOTS”.

Berdasarkan data tersebut peneliti berpendapat diperlukan pembinaan bagi calon guru dan peserta didik dalam memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembelajaran di era digital. Hal ini diperkuat dalam Studi yang dilakukan Trilling dan Fadel (2009) menunjukkan bahwa tamatan sekolah menengah, diploma dan pendidikan tinggi masih kurang kompeten dalam hal: (1) komunikasi oral maupun tertulis, (2) berpikir kritis dan mengatasi masalah, (3) etika bekerja dan profesionalisme, (4) bekerja secara tim dan berkolaborasi, (5) bekerja di dalam kelompok yang berbeda, (6) menggunakan teknologi, dan (7) manajemen proyek

dan kepemimpinan. *ASEAN Business Outlook Survey 2014* melaporkan hasil kajiannya dan menyatakan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara tujuan investasi asing dan bahkan menjadi salah satu tujuan utama di wilayah ASEAN. Survei tersebut juga mengindikasikan fakta yang kurang baik, bahwa Indonesia memiliki tenaga kerja dengan keahlian rendah dan murah. Jika dibandingkan dengan lulusan negara lain yang lebih ahli dan terlatih, misalnya Filipina sebagai peringkat tertinggi, bangsa Indonesia tidak akan mampu bersaing dan akan kehilangan kesempatan kerja yang baik, jika tidak didukung suatu program yang mencetak lulusan ber keterampilan tinggi. Seiring dengan perubahan pola hidup manusia akibat hadirnya teknologi, tempat kerja menjadi lebih berbasis komputer dan bertransformasi. Dibandingkan dengan pada masa 20 atau 30 tahun yang lalu, para lulusan Indonesia kini membutuhkan keterampilan lebih untuk berhasil dalam menghadapi persaingan ketat abad ke-21. Hal ini merupakan tantangan yang harus disikapi dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh Kemendikbud mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaan dengan ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, dan kurikulum/program diantaranya yaitu “memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan dan memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri” (Permendikbud No. 22 Tahun 2020, hlm. 44).

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti berpendapat bahwa kemampuan berpikir kritis akan menjadi tonggak dasar tercapainya keterampilan lain yang menunjang peradaban dan keterampilan di era digital .Sebagaimana Scriven mengemukakan bahwa:

“critical thinking is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and evaluating information gathered from, or generated by observation, experience, reflection, reasoning, or communication”. (Scriven & Paul, 2007)

Pendapat diatas memberi indikasi bahwa berpikir kritis merupakan disiplin intelektual yang diperoleh melalui proses aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi terhadap informasi yang didapat melalui observasi, pengalaman dan komunikasi. Selanjutnya Prensky (2001), mengatakan bahwa “mayoritas siswa saat ini dianggap

sebagai penduduk asli digital (*digital native generation*). Ini merujuk pada fakta bahwa mereka telah terbiasa dengan perangkat elektronik apa pun, termasuk penggunaan ponsel dan internet sejak mereka masih kecil. Oleh karena itu, para guru seharusnya tidak ketinggalan peserta didik dalam menggunakan teknologi.”. Dalam era digital keterampilan berpikir kritis sangat diperlukan agar mampu mengarahkan penggunaan teknologi pada kegiatan yang positif, peran tersebut harus dimiliki oleh guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran.

Today teachers are required to be facilitators helping learners to make judgements about the quality and validity of new sources and knowledge, be open-minded and critical independent professionals, be active cooperators, collaborators, and mediators between learners and what they need to know, and providers to scaffold understanding. (Weinberger, Fischer, & Mandl, 2002).

Oleh karena itu peranan lembaga pendidikan tinggi dalam hal ini perguruan tinggi penyelenggara pendidikan keguruan sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan kepada calon guru yang kelak akan menjalani profesi sebagai guru di lingkungan persekolahan. Perguruan tinggi khususnya LPTK sebagai institusi penyelenggara pendidikan bagi calon guru harus mempersiapkan lulusan yang akan menjadi guru yang sesuai dengan konsep *ready for use* atau siap guna dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Sebagaimana pendapat yang mengemukakan bahwa “. Kebutuhan akan kurikulum yang mampu mempersiapkan lulusan program studi PPKn yang siap pakai diperlukan dalam menjawab tantangan dunia yang semakin mengglobal dan ketersediaan sumber daya yang ada di dunia”.(Nugraha, Y., & Danial, E. 2020). Selain itu penyesuaian kurikulum di perguruan tinggi juga akan memengaruhi bagaimana calon guru mampu menjadi seorang yang akan siap mengimplementasikan amanat pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran di sekolah dan mata kuliah di lingkungan perguruan tinggi yang mengandung muatan materi yang memerlukan analisis kemampuan berpikir kritis agar lebih mudah tercapainya tujuan dari PPKn yaitu *smart and good citizenship*.”...Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi politik

yang diperluas dengan sumber pengetahuan lain, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, kemudian semua itu diproses guna melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, serta bersikap dan bertindak dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Somantri (2001, hlm. 299). Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi era globalisasi hendaknya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*). “Di antaranya aspek aspek *civic competences* meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic diposition*) sehingga akan menumbuhkan karakter warga negara yang baik.” Branson (1999, hlm. 8-25). Selanjutnya Cogan & Derricot, (1998) mengemukakan bahwa “warga negara global harus memiliki karakter warga negara multidimensional, yaitu; kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan budaya, kemampuan berpikir kritis dan sistematis; dan kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai”. (Machfiroh, 2019). Kondisi faktual yang terjadi di Indonesia saat ini pembelajaran PKn masih didominasi oleh sistem konvensional, sehingga penerapan pembelajaran yang berorientasi pada konsep *contextualized* masih belum berkembang. Hal ini terbukti dengan masih munculnya masalah pembelajaran di mana sebagian besar peserta didik tidak dapat menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dengan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupannya saat ini dan di kemudian hari. Artinya, “pembelajaran tidak memberi makna bagi peserta didik dalam memecahkan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi. Pembelajaran belum mampu mengembangkan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* secara komprehensif”. (Komalasari, 2009, hlm. 1)

Menurut pendapat diatas dapat diketahui bahwa sebagai calon guru PPKn dalam menghadapi era digital harus mampu menguasai keterampilan berpikir kritis dalam dirinya yang kelak akan diaplikasikan dalam kehidupannya sebagai guru PPKn di sekolah. Guru di era digital memiliki beberapa tantangan sebagaimana dikemukakan Diplan bahwa “tantangan guru di era milenial sangat berat dibanding guru–guru di era terdahulu. Selain menguasai aspek materi keilmuan yang di ajarkan. Guru dituntut

memahami teknologi dan selalu menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Guru harus menjadi *role model* bagi peserta didik di generasi milenial, agar mereka mampu memahami tantangan pendidik di era digital, sehingga terhindar dari pemanfaatan yang salah dalam menggunakan teknologi”. (Diplan, 2019). Selanjutnya pendapat lain mengungkapkan “*technology changes how we think, gather and produce information. In particular, the Internet changes our life and ways of thinking*”. (Şahin & Solmaz, Burcu. 2019, hlm. 3). Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa teknologi mengubah cara kita untuk berpikir dan mengakses informasi. “*New technologies may help our students augment their personal and collaborative intellectual resources in a way that makes knowledge creation feasible*”. (Srinivasan, 2017). Hal ini mengungkapkan bahwa peserta didik memerlukan bimbingan guru dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sehingga akan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikirnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap calon guru yang menjadi tongkat estafet dari generasi yang menjadi pengaruh dalam dunia pendidikan lebih fokus pada persiapan untuk menghadapi tantangan era digital dengan menguasai kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu peneliti berencana melakukan penelitian dengan judul “Keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru PPKn dalam era digital” (Studi pada Mahasiswa Calon Guru Program Studi PPKn FKIP Universitas Pasundan Bandung)”).

1.2 Rumusan Masalah

Kemampuan berpikir kritis menjadi suatu kebutuhan dalam menghadapi tantangan pada era digital dalam proses pembelajaran. Keterampilan ini akan membantu calon pendidik untuk mempersiapkan diri tatkala akan menjadi guru di lingkungan sekolah kemudian akan mengimplementasikan pada proses pembelajaran. Calon guru PPKn idealnya mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis saat mereka berada pada jenjang perkuliahan sebagai proses persiapan dan perencanaan untuk menjadi guru pada generasi milenial. Bagaimana mengarahkan peserta didik agar

mampu melakukan analisa terhadap permasalahan yang disajikan kemudian mencari alternatif pemecahan masalah tersebut.

Adapun fokus permasalahan pada rencana penelitian adalah: “bagaimana keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru PPKn dalam era digital?”. Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru PPKn saat ini?
2. Mengapa calon guru PPKn memerlukan keterampilan berpikir kritis?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Program Studi PPKn FKIP Universitas Pasundan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru PPKn dalam era digital?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru ppkn dalam era digital pada Program Studi PPKn FKIP Universitas Pasundan Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kondisi keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru PPKn saat ini
2. Untuk mendeskripsikan alasan diperlukanya keterampilan berpikir kritis pada mahasiswa calon guru PPKn
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Program Studi PPKn FKIP Universitas Pasundan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru PPKn dalam era digital

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat yang positif dan menjadi kontribusi dalam kemajuan bidang pendidikan dan pembelajaran. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat dari Segi Teori

Manfaat dari segi teoritis bidang Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan Mampu memberikan sumbangan pemikiran serta bahan kajian dalam dunia pendidikan lebih khususnya dalam keterampilan berpikir kritis pada Pendidikan Kewarganegaraan.

1.4.2 Manfaat dari segi Kebijakan

Manfaat dari segi kebijakan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu acuan penentuan kebijakan dalam keterampilan berpikir kritis pada Pendidikan Kewarganegaraan

1.4.3 Manfaat dari Segi Praktik

Manfaat dari segi praktis diharapkan agar penulis dapat membantu menambahkan wawasan kemampuan berpikir kritis berdasarkan hasil penelitian ini yang kemudian akan menjadi solusi dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

1.4.4 Manfaat segi isu serta aksi sosial

Manfaat segi isu dan aksi sosial diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan adanya aksi yang mendorong kebijakan yang mengarah pada pengembangan kemampuan berpikir kritis

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi penulisan tesis ini berisi rincian tentang urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam tesis. Sistematika penulisan di dalam penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab yang akan dirinci sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan.** Bab ini pada dasarnya bab perkenalan, merupakan bagian awal dari tesis yang berisi lima bagian, yaitu latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi tesis.
2. **Bab II Kajian Pustaka.** Bab ini memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bagian ini memiliki peran yang sangat penting. Melalui kajian pustaka ditunjukkan *the state of the art* dari teori yang sedang dikaji dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Bab ini berisikan konsep-konsep teori-teori yang berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis calon guru PPKn dalam era digital
3. **Bab III Metode Penelitian.** Bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitian. Pada penelitian kualitatif berisikan unsur-unsur antara lain desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan isu etik.
4. **Bab IV Temuan dan Pembahasan.** Bab ini menyampaikan temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan urutan rumusan permasalahan penelitian. Selain itu menyampaikan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.
5. **Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi.** Bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.